

PERENCANAAN
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)
PT.SUCOFINDO (PERSERO)

Adisam.ZN

17/415/390224/PEK/21006

Dalam rangka implementasi Undang-Undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas melakukan sertifikasi halal di Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga penentuan fatwa halal dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan kehalalan produk dilapangan. Dengan diberlakukannya Undang undang ini secara wajib pada bulan oktober 2019, maka terbuka peluang untuk membentuk Lembaga Pemeriksa Halal(LPH). PT. Sucofindo (Persero) akan membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal dimaksud.

Dengan adanya kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis dan diketahui kelayakan kinerja keuangan dan non keuangan terhadap rencana pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) PT.Sucofindo (Persero) dengan asumsi keuangan telah ditentukan di awal untuk melakukan analisis kelayakan finansial. Proyeksi laba rugi, arus kas selama lima tahun menjadi dasar perhitungan nilai NPV, IRR, payback period, profitability index. Kajian Non Keuangan menggunakan Standar Nasional dan Internasional yang ditetapkan oleh BPJPH.

Hasil kajian kelayakan keuangan menunjukkan investasi awal sebesar Rp.892.000.000 dengan laba bersih 14,49% Tahun Pertama, NPV Rp.4,039,629,166, IRR 17,35%, PBP 1 tahun 7 bulan dan PI 5,62. Hasil kajian kelayakan non keuangan menunjukkan bahwa LPH PT.Sucofindo (Persero) sudah memenuhi persyaratan sesuai standar yang ditetapkan BPJPH.

Kajian ini menyimpulkan pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) PT.Sucofindo (Persero) layak dijalankan dikarenakan hasil perhitungan analisis kelayakan finansial memberikan hasil yang positif dan kajian non keuangan sudah memenuhi persyaratan standar.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Kelayakan Finansial

ABSTRACT

PERENCANAAN LEMBAGA PEMRIKSA HALAL (LPH) PT.SUCOFINDO (PERSERO)

Adisam.ZN

17/415/390224/PEK/21006

In the framework of implementing Law No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products the government has established a Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) which is in charge of carrying out halal certification in Indonesia in collaboration with the Indonesian Ulema Council (MUI) as an institution for determining halal fatwas and Halal Inspection Bodys (LPH) as an institution that conducts product halal checks in the field. With the enactment of this Law compulsorily in October 2019, there are opportunities to form a Halal Inspection Body (LPH). PT. Sucofindo (Persero) will establish a Halal Inspection Body (LPH) in accordance with the provisions of the Law and Government Regulations concerning the Guaranteed Halal Product.

With these conditions, it is necessary to analyze and find out the feasibility of financial and non-financial performance against the plan to establish a Halal Inspection Body (LPH) of PT.Sofofindo (Persero) with financial assumptions determined at the outset to conduct a financial feasibility analysis. The projection of profit and loss, cash flow for five years is the basis for calculating the NPV value, IRR, payback period, profitability index. Non-Financial Studies use National and International Standards set by BPJPH.

The results of the financial feasibility study showed an initial investment of Rp. 892,000,000 with a net profit of 14.49% First Year, NPV Rp.4,039,629,166, IRR 17.35%, PBP 1 year 7 months and PI 5.62. The results of the non-financial feasibility study indicate that LPH PT.Sucofindo (Persero) has met the requirements according to the standards set by BPJPH.

This study concludes that the formation of the Halal Inspection Agency (LPH) of PT.Sucofindo (Persero) is feasible because the results of the calculation of financial feasibility analysis provide positive results and non-financial studies have met the standard requirements

Key words: *Halal Certification, Halal Inspection Body (LPH), Financial Feasibilit*